

Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Analysis of the Effectiveness of Regional Financial Management Information Systems in the Development of Development and Spatial Planning Central Sulawesi Province

¹Dicky Yusuf*, ²Dasa Febrianti, ³Puput Irawan

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu.

(*)Email Korespondensi: dickyusuf3@gmail.com

Abstrak

Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sistem informasi manajemen daerah keuangan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan aplikasi simda dalam mengelola keuangannya. Kebijakan penerapan simda pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk mengelola proses yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Program sistem informasi daerah keuangan yang diterapkan dalam Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan program yang kompleks dalam pengelolaan keuangan, sejauh ini sudah cukup efektif untuk mengelola keuangan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas; Sistem Informasi; Manajemen Daerah

Abstract

To determine and analyze the effectiveness of the regional financial management information system at the Department of Highways and Regional Spatial Planning of Central Sulawesi Province. The results of this research are that the Central Sulawesi Province Department of Highways and Spatial Planning applies the Simda application in managing its finances. The policy for implementing simda at the Central Sulawesi Province Department of Highways and Spatial Planning is carried out to manage processes related to regional financial management, starting from planning, budgeting, administration and reporting. The regional financial information system program implemented in the Central Sulawesi Province Department of Highways and Spatial Planning is a complex program in financial management, so far it has been quite effective in managing regional finances.

Keywords: Effectiveness; Regional Management; Information Systems.

PENDAHULUAN

Bentuk dan substansi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dibuat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 2 ayat 2 butir (e) tentang pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dengan dukungan pengambilan keputusan ekonomi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, pentingnya akuntansi mengingat bahwa data keuangan sangat penting untuk kehidupan ekonomi, khususnya di ranah pemerintahan. Berdasarkan kerangka sistem tata kelola,

dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.

Semua pendapatan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dikelola oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh satuan perangkat daerah yang mengemban tugas pemungutan pajak daerah wajib memungutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan akuntansi pemerintah tidak jauh berbeda dari seluruh perusahaan. Seperti yang kita lihat beberapa hal seperti pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan dan penjelasan transaksi keuangan instansi pemerintah juga termasuk dalam akuntansi perusahaan. Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses keuangan daerah. Keuangan daerah mengacu pada semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan mata uang dalam ruang lingkup pengelolaan pemerintah daerah, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.

Banyak pengelola keuangan daerah, baik itu bendahara pendapatan, bendahara pengeluaran, auditor SKPD (Satuan Kerja Dinas), SKPD PPK (Pengelola Keuangan) maupun auditor BUD (Bendahara Umum Daerah), melakukan verifikasi hanya atas dasar tanggung jawab berdasarkan bukti-bukti masa lalu. pengalaman atau rekomendasi auditor, sekalipun ada pedoman bagi manajemen, tidak sepenuhnya mengatur segala isinya, bahkan tidak dijadikan pedoman lagi.

Sistem Informasi Manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Hall, (2007) sistem adalah “kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan dan memiliki fungsi dengan tujuan yang sama”. Sutanto (2004) mendefinisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. Manajemen didefinisikan oleh Nugroho, (2007) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut Raymod McLeod (2012) Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu, yang sedang terjadi sekarang, dan yang mungkin terjadi pada masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika Informasi digunakan oleh pengelola ataupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauh mana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah ekonomis, efisien dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 adalah suatu kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota. Untuk menangani uang desentralisasi secara transparan, terjangkau, efisien, efektif, dan akuntabel kepada publik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah

yang kompeten. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik dapat meningkat dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; hal ini menghadirkan tantangan bagi kemampuan pemerintah untuk berfungsi lebih efisien.

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan aplikasi SIMDA dalam rangka efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi ini.

Keefektifan program atau kegiatan adalah ukuran seberapa baik program tersebut memberikan hasil dan manfaat yang diantisipasi oleh organisasi. Aspek penting dari sistem informasi yang dapat mencerminkan sistem pemrosesan informasi dan menghasilkan informasi yang berguna adalah efektivitas sistem. Kualitas sistem mengungkapkan efektivitas sistem. Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna Simda adalah kualitas sistem informasinya. Hal ini dikarenakan simda digunakan untuk memproses keseluruhan siklus akuntansi dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang efektif akan muncul dari penggunaan simda yang berkualitas.

Efektifitas sistem informasi daerah dilakukan sampai pada tingkat dimana sistem tersebut memfasilitasi perpaduan informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan, khususnya di bidang keuangan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan sistem terintegrasi untuk menghubungkan berbagai sistem komputerisasi dan perangkat lunak aplikasi baik secara fisik maupun fungsional. Komponen subsistem tersebut akan digabungkan menjadi satu sistem dengan sistem terintegrasi yang telah diterapkan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, memastikan subsistem tersebut berjalan sebagai satu sistem.

Selain integritas tersebut diatas, dibutuhkan juga fleksibilitas sistem informasi yang dapat mendukung kemampuan sistem dalam menyesuaikan terhadap dinamisasi

dan perubahan proses kebijakan didalam organisasi atau instansi. Selain itu pula efektivitas kerja sistem informasi daerah khususnya dibidang keuangan membutuhkan adanya aksesibilitas yang ada dapat mendukung kemampuan sistem dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh kepala dinas maupun bendahara dinas yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana produk, perangkat, layanan, atau lingkungan yang tersedia untuk orang sebanyak mungkin.

Kemampuan sistem informasi daerah dalam bidang keuangan terdapat pula formalisasi merupakan uraian aturan tentang bagaimana bendahara, operator maupun kepala dinas berinteraksi antara satu sama lain. Dengan adanya formalisasi dalam sistem informasi daerah khususnya keuangan menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Yang terakhir dalam mendukung efektivitas sistem informasi daerah dalam bidang keuangan yaitu kekayaan media yang merupakan saluran informasi guna saling berinteraksi satu sama lain. Kemampuan bendahara, operator, staf dan kepala dinas untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks, sehingga pemanfaatan media yang baik dapat mengatasi perbedaan dengan efektif dan dapat mengklarifikasi masalah-masalah yang dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan media komunikasi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyampaikan pemahaman.

Hasil dari penerapan sistem informasi adalah kemampuan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, komprehensif, akurat, dan dapat diandalkan. Efektivitas sistem merupakan faktor penentu yang signifikan yang mempengaruhi. Suatu sistem pemrosesan informasi yang memungkinkan suatu sistem informasi menghasilkan informasi yang berguna dapat tercermin dalam sistem tersebut. Program simda digunakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Sulawesi Tengah untuk menangani keuangannya. Strategi pelaksanaan simda Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Sulawesi Tengah bertujuan untuk mengontrol tata cara pengelolaan keuangan daerah, mulai dari

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

Sesuai dengan pengertian sistem informasi Menurut (Raymond McLeod, 2010) “Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan”.

Menurut hasil wawancara dengan staf Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, implementasi SIMDA di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sangat efektif dan dapat menghasilkan kemampuan operasional Komputer, kemampuan menyusun dan mengimplementasikan data keuangan daerah, rutinitas komunikasi antar pengguna, sehingga menyediakan infrastruktur yang memadai. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pengelolaan keuangan kompleks yang saat ini sangat sukses dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Menyusun prosedur sistem informasi daerah keuangan seperti :

1. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Menguji coba sarana dan prasarana yang disiapkan
4. Implementasi terhadap sarana dan prasarana.

Integrasi sistem informasi adalah salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Sistem bersama dapat saling berhubungan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan. Aliran informasi antar sistem berguna ketika sistem lain juga membutuhkan data dalam file satu sistem, atau ketika output dari satu sistem menjadi input sistem lainnya. Beberapa integrasi juga dapat dicapai secara manual, seperti membawa data dari satu bagian ke bagian lain dan menggabungkan pengelola data dengan data dari sistem lain. Sehingga jika dilakukan secara manual, tingkat

integrasinya akan sangat tinggi. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah peningkatan arus informasi dalam organisasi. Pelaporan biasanya memakan waktu, namun jika diperlukan lebih banyak informasi terkait aktivitas manajemen dapat diperoleh.

Fleksibilitas mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional sistem informasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, namun faktor fleksibilitas ini jarang dipertimbangkan secara eksplisit dalam desain dan implementasi sistem informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara bahwa :

“Sistem informasi daerah khusus bidang keuangan sendiri sudah cukup fleksibel diterapkan pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengelolaan keuangan namun masih kurang disebabkan karena simda tidak dapat digunakan untuk instansi lain dan simda hanya difokuskan untuk keperluan manajemen keuangan sehingga seluruh perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari pengembang program SIMDA”.

Menurut Ramadhan (2013) menggarisbawahi bahwa hal ini terjadi akibat kurangnya inisiatif pimpinan dalam melakukan inkuiri dan mendukung proses pengembangan sistem untuk menghasilkan data pelaporan yang akurat. Visi atasan untuk mengembangkan proses pengelolaan keuangan yang efektif terkait dengan komitmen atasan terhadap pengembangan sistem saat ini.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sudah diterapkan oleh Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih efektif dengan diterapkannya sistem informasi pengelolaan daerah yang memungkinkan setiap pimpinan SKPD dapat dengan cepat mendapatkan data berupa persentase penyerapan dana untuk setiap kegiatan. di masing-masing SKPD pada kesempatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mengelola keuangan daerah, sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Namun, ada sedikit pengawasan dalam pengelolaan keuangan karena sistem informasi keuangan daerah masih belum terintegrasi dengan program lain dan fleksibilitas pemrogramannya perlu ditingkatkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Untuk solusi Sistem informasi manajemen daerah keuangan tidak terintegrasi dengan aplikasi lain maka pihak Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah selaku operator Sistem informasi daerah keuangan harus memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ada agar proses pencatatan tidak bermasalah.
2. Untuk solusi kurangnya pengembangan pada program sistem informasi daerah keuangan maka pegawai sebaiknya menyuarkan keluhan-keluhan dan saran pengembangan dalam rapat guna pengelolaan keuangan yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Ade Lestari, Baiq Anggun Hilendri Lestari dan Lalu Takdir Jumaidi. 2022. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Jurnal Risma. Vol. 2. No. 1. Hal. 1-8.
- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Grafindo. Jakarta.
- Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Taushia. Jakarta Pusat.
- Fitria. 2014. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. JMP. Vol. 1 Nomor 1. Hal. 82-94.
- Hariadi. P., Restianto, dan Bawono. 2015. Pengelola Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Hall, A James. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Diterjemahan oleh: Dewi Fitriyani . Salemba Empat: Jakarta.
- Ihyaul Ulum, MD. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit. ANDI, Yogyakarta.
- Nafischa Erning Nabilah. 2021. Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Nugroho, Riant. 200. Analisis Kebijakan. PT.Gramedia Jakarta
- Ni Nengah Wartini dan I.G.W. Murjana Yasa. 2016. Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 5.5. ISSN. 2337-3067. Hal. 1411-1438

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pusdiklatwas BPKP. 2007. Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi. Kelima.
- Putu Ayu Puji Laksmi Dewi, Aminah, dan Yusli MARIADI. 2021. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. Valid Jurnal Ilmiah. Vol. 19. No.1. Hal. 72-86.
- Raymond McLeod. Jr, dan George P. Schell, 2012. Sistem Informasi Manajemen, 10th ed, Salemba Empat. Jakarta.
- Restu Inayah, Arista Hakiki dan Relasari. 2016. Analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat. Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembangan AKuntansi. Vol. 10. No. 2. Hal. 167-175.
- Ridha Eka Putri dan Syahmardi Yacob. 2021. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan. Vol. 10. No. 02. Hal. 329-340.
- Sutrisno. 2009. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama, Cetakan. Ketujuh, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Susanto, A,. 2004. Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya. Penerbit Lingga Jaya. Bandung.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah